Edification Journal
Pendidikan Agama Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau
ISSN: 2741-7681 (P); 6886-0988 (E)
Volume 9 No. 1, Juli 2026 | 45-63
DOI: https://doi.org/10.37092/ej.v9i1.1610

INTEGRASI NILAI-NILAI MULTIKULTURAL DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH TSANAWIYAH: PERSPEKTIF POLITIK PENDIDIKAN

Yesi Arikarani, Hecksa Manora, Nurlila Kamsi, Imam Mahdi, Adisel
STAI Bumi Silampari Lubuklinggau, Indonesia, STAI Bumi Silampari Lubuklinggau, Indonesia, STAI Bumi Silampari Lubuklinggau, Indonesia, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
yesiarikarani@gmail.com, mhecksa@gmail.com, nurlilakamsi@gmail.com, *imam.mahdi@iainbengkulu.ac.id, adisel@iainbengkulu.ac.id*

Article History
Received:17-04-2026
Revised : 29-05-2026
Accepted:05-06-2026

Keywords:
Islamic Education; Multicultural Values; Madrasah Tsanawiyah Curriculum; Politics of Education;

Abstract

Islamic education in Madrasah Tsanawiyah plays a strategic role in fostering a tolerant, inclusive, and moderate generation within a pluralistic society. The integration of multicultural values into the Islamic Religious Education (PAI) curriculum is essential for strengthening social cohesion, promoting mutual respect, and preventing intolerance. This study aims to analyze the influence of educational political policies on the implementation of multicultural values in the PAI curriculum and to identify the associated challenges and opportunities. The research employs a qualitative library research approach through the analysis of scholarly literature, educational regulations, and relevant policy documents. That policies such as the Independent Curriculum, the Pancasila Student Profile, and the Rahmatan lil 'Alamin Student Profile provide a formal foundation for integrating multicultural values into curriculum content, learning processes, and school culture. However, limited teacher competence, insufficient contextual teaching materials, monocultural perspectives, and identity politicization remain significant challenges that require collaborative and sustainable solutions.

Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia, Pendidikan Islam perlu menanggapi tantangan globalisasi yang kian rumit, terutama terkait multikulturalisme. Madrasah Tsanawiyah berperan penting dalam membentuk karakter siswa yang toleran dan menghargai perbedaan. Integrasi nilai multikultural dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Tsanawiyah sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memperkuat kohesi sosial di masyarakat yang beragam. Pendidikan multikultural terbukti dapat meningkatkan kesadaran sosial siswa.(Nasution & Fauzan, 2025)

Integrasi nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan Islam merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Pemerintah

berusaha mengakomodasi keragaman budaya dan agama di Indonesia melalui kebijakan pendidikan. Menurut Hayyu Liyandani & Nur Kolis (2021), kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia telah bertransformasi secara signifikan, beralih dari pendekatan homogen ke yang lebih inklusif. Ini memberikan kesempatan bagi madrasah untuk menerapkan kurikulum yang mencerminkan nilai multikultural.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah berfungsi sebagai sarana utama untuk menanamkan nilai-nilai multikultural kepada siswa. Melalui penguatan materi ajar tentang toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta prinsip keadilan sosial dalam Islam, madrasah memiliki potensi strategis dalam membentuk generasi yang berpikiran terbuka dan inklusif. Penelitian (Edy & Huriah, 2022) mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural dalam PAI di madrasah tsanawiyah dapat meningkatkan sikap saling menghargai dan mengurangi diskriminasi antar kelompok. Dalam pelaksanaannya, kurikulum di madrasah tsanawiyah sesuai KMA No 184 tahun 2019, terdapat tiga poin penting: kebutuhan akademik, sosial, dan ketersediaan waktu. Hal ini mencakup penyesuaian jam pelajaran hingga 6 jam untuk mata pelajaran tertentu serta penerapan pembelajaran terpadu dengan pendekatan kolaboratif.

Setelah Orde Baru, kurikulum pendidikan berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman, hingga lahirlah Kurikulum 2013 sebagai pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Pengakuan terhadap madrasah dan pesantren mendorong kemajuan pendidikan Islam, sementara penyeragaman materi dan kurikulum mendapat perhatian lebih pada era reformasi. (Tri Cahyanti, 2021). Dan pada tahun 2020 mulai lah dengan disusunnya kurikulum merdeka yang diresmikan 2024 hingga saat ini. Kementerian Agama menyusun kurikulum merdeka madrasah untuk menyesuaikan dengan kurikulum merdeka dari Kemendikbudristek, sambil tetap menjaga keunikan madrasah, khususnya dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Dukungan terhadap penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Pelajar Rahmatan lil ‘Alamin, atau P5RA, yaitu integrasi nilai kebangsaan dan keislaman, tetap dilanjutkan.

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut (Putra Daulay, 2004) Pendidikan Keagamaan Islam adalah bagian dari pendidikan Islam secara keseluruhan. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam muncul dalam tiga bentuk: lembaga pendidikan, mata pelajaran, dan nilai-nilai sebagai dasar. Kurikulum bukan sekadar alat pengajaran, melainkan juga hasil dari dinamika politik, ideologi, dan kepentingan negara dalam membentuk karakter masyarakat. Menurut (Hayyu Liyandani & Nur Kolis, 2021) pendidikan diperlukan untuk memberikan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kepribadian dalam menerapkan ajaran agama, serta mempersiapkan peserta didik agar menjadi ahli dalam ilmu agama dan mengamalkannya. Dasar hukum pendidikan multikultural di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yang menjadi pedoman operasional pendidikan nasional. Undang-undang ini menekankan pentingnya merancang pembelajaran yang sesuai dengan budaya, norma, dan kebutuhan masyarakat.(Umam et al., 2025). Begitu juga, Integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum juga terlihat dalam pengembangan keterampilan interpersonal siswa. (Bektiarso et al., 2024). Dengan

demikian kebijakan pendidikan agama di Indonesia lebih termanajemen dengan baik dan menuju pendekatan yang lebih inklusif membuka ruang bagi penerapan nilai-nilai multikultural dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk Madrasah Tsanawiyah.

Politik sebagai disiplin ilmu mengkaji pembentukan negara dan sistem pemerintahan, termasuk bagaimana otoritas pusat terbentuk secara konstruksi teoritis. Dalam konteks pendidikan, politik pendidikan menyoroti bahwa kebijakan kurikulum khususnya melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dirancang tidak hanya untuk tujuan pedagogis tetapi juga untuk mengakomodasi prinsip pendidikan Islam yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari warisan budaya nasional . (Umam et al., 2025). Politik pendidikan, sebagaimana dijelaskan (Rizki et al., 2024) menemukan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum madrasah, meski berada di naungan kementerian yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kepentingan politik daerah dan nasional saling mempengaruhi isi dan pengaplikasian kurikulum, sehingga terjadi variasi praktik di lapangan. Dalam hal ini (Shodikin, Jamiluddin, Ermanita, 2024) kekuasaan politik berfungsi sebagai sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan otoritasnya. Guna menjaga stabilitas kekuasaannya, pemerintah membutuhkan warga negara yang terdidik dan mampu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi instrumen utama dalam membentuk masyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing melalui pendekatan politik pendidikan.

Meninjau beberapa penelitian sebelumnya yang banyak membahas tentang integrasi nilai multikultural menjadi dasar untuk mengkaji secara spesifik dan berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitiannya (Lubis & Ok, 2025)menyimpulkan bahwa Integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah menjadi penting agar peserta didik mampu mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai di tengah keberagaman. Selanjutnya penelitian (Fahmi et al., 2025) Kurikulum Pendidikan Agama Islam harus diarahkan untuk memperkuat karakter moderat dan identitas Islam yang ramah terhadap pluralitas. Menurut (Shodikin, Jamiluddin, Ermanita, 2024) Pendekatan multikultural tidak hanya menyentuh aspek pengajaran, tetapi juga terkait erat dengan kebijakan dan politik pendidikan, karena arah kurikulum dan konten pendidikan sangat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah dalam merespons realitas sosial budaya masyarakat. Selanjutnya penelitian oleh (Muhajir et al., 2025) menunjukkan bahwa madrasah memiliki peluang besar dalam membangun pendidikan inklusif jika didukung oleh regulasi yang tepat dan guru yang berwawasan multikultural. Kemudian penelitian (Hayyu Liyandani & Nur Kolis, 2021) Pendidikan berfungsi sebagai alat utama dalam menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan kompetitif melalui pendekatan politik.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pendidikan multikultural dalam konteks pendidikan Islam, baik yang berfokus pada penguatan toleransi, moderasi beragama, implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam, maupun pengembangan budaya sekolah yang inklusif. Penelitian Lubis dan Hanum (2025) menekankan pentingnya integrasi nilai multikultural dalam membangun sikap toleran peserta didik di madrasah. Sementara itu, Fahmi dkk. (2025) menyoroti peran kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam memperkuat

karakter moderat dan penghargaan terhadap keberagaman. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa pendidikan multikultural berkontribusi terhadap penguatan kohesi sosial dan pembentukan karakter inklusif peserta didik.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek implementasi pembelajaran, internalisasi nilai, dan praktik pendidikan multikultural di lingkungan madrasah. Kajian yang secara khusus menganalisis integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah dari perspektif politik pendidikan masih relatif terbatas. Padahal, integrasi nilai multikultural tidak hanya dipengaruhi oleh praktik pedagogis di kelas, tetapi juga oleh arah kebijakan pendidikan, regulasi kurikulum, dan kepentingan politik pendidikan yang membentuk sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah dari perspektif politik pendidikan. Kebaruan penelitian terletak pada upaya mengkaji hubungan antara kebijakan pendidikan, regulasi kurikulum, dan penguatan nilai-nilai multikultural dalam pendidikan Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan politik pendidikan, pengembangan kurikulum, dan penguatan nilai-nilai multikultural di madrasah.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis konsep, kebijakan, dan implementasi integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah dari perspektif politik pendidikan. Data diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang terdiri atas artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, dokumen kebijakan pendidikan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan yang relevan dengan tema penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam mencari informasi yang relevan dan kredibel.(Syafruddin, Rif'an, Anshary et al., 2024) proses pengumpulan data dilakukan melalui Pertama, identifikasi kata kunci yang terkait dengan topik, melakukan pencarian literatur melalui platform seperti google scholar, researchgate, sinta, scopus, perpustakaan digital dan repositori jurnal. Kata kunci yang digunakan meliputi "pendidikan multikultural", "kurikulum pendidikan Islam", "madrasah tsanawiyah", "politik pendidikan", "moderasi beragama", dan "kurikulum merdeka". Literatur yang dipilih merupakan publikasi yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian, terutama yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020–2025, serta beberapa referensi klasik yang digunakan sebagai landasan teoritis. Untuk menganalisis dengan pendekatan naratif atau diskursif, menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) melalui proses reduksi, kategorisasi, dan sintesis data. Analisis difokuskan pada tema kebijakan pendidikan Islam, multikulturalisme, kurikulum madrasah, dan politik pendidikan. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil penelitian, regulasi, dan dokumen kebijakan yang relevan pada pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam di Madrasah Tsanawiyah.

Pembahasan

Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia dan Implikasinya terhadap Kurikulum

Dengan adanya inovasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh suatu institusi kenegaraan kemudian peraturan kebijakan tersebut diterapkan oleh lembaga pendidikan merupakan sebuah kemajuan suatu negara terkhusus pada Indonesia. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini Menurut hasbullah dikutip oleh (Fazlurrahman H, M., 2017) Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk pengembangan pendidikan, termasuk wajib belajar 12 tahun, ujian nasional, desentralisasi pendidikan, sertifikasi guru, peningkatan kualitas guru, manajemen berbasis sekolah, kurikulum berbasis kompetensi, dan penerapan kurikulum 2013. Ini memiliki dua wadah yang berbeda yaitu kementerian pendidikan dan kemenang yang menaungi beberapa pendidikan Islam.

Berdasarkan sejarahnya pendidikan Islam Indonesia setelah merdeka berjalan dan terus berjalan dan mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Pada tahun 1970-an, pemerintah mulai memperhatikan lembaga pendidikan Islam, ditandai dengan penerbitan SKB 3 Menteri pada 1975, yang diikuti oleh SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai regulasi dan standarisasi kurikulum sekolah umum serta madrasah. UUNo. 2 Tahun 1989 mengakui secara resmi lembaga pendidikan Islam dan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Setelah itu munculnya isu yang booming dari kementerian agama adanya *full day school*. Untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, masa wajib belajar diperpanjang dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Lihat ahmad ikrom dalam (Fazlurrahman H, M., 2017)

Pada akhir 1980-an, pendidikan Islam memasuki fase integrasi melalui disahkannya UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU ini mencakup pendidikan formal dan non-formal, serta berbagai jenis pendidikan, termasuk akademik dan keagamaan. Meskipun tidak secara khusus mengatur pendidikan Islam, UU ini memberikan ketentuan baru mengenai jenis dan kurikulum pendidikan, terutama di madrasah. mplementasi UUSPN dalam pendidikan madrasah tercermin dalam kurikulum di semua tingkat, mulai dari ibtidaiyah hingga Aliyah. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 tahun 1993 mencerminkan Kurikulum Pendidikan yang khas dengan nilai-nilai Islam. Kurikulum pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berfokus pada agama Islam harus mencakup bahan kajian yang relevan, termasuk pelajaran Al-Qur'an-Hadist, Aqidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab, dengan tujuan mendukung pembentukan kepribadian Muslim. Kurikulum pendidikan SMP yang berorientasi pada agama Islam perlu mencakup materi yang relevan, seperti Al-Qur'an-Hadist, Aqidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab, untuk mendukung pembentukan karakter Muslim. Kurikulum dan program di MTs terbuka sejalan dengan MTs reguler, menggunakan metode pengajaran modul tertulis yang didukung media radio dan kaset. Madrasah terbuka dalam (Fazlurrahman H, M., 2017).

Husni Rahim dalam (Fazlurrahman H, M., 2017) menyatakan bahwa UU RI No. 20 Tahun 2003 mengakui pendidikan Islam, menjadikan madrasah dan pendidikan keagamaan bagian dari sistem pendidikan nasional. Undang-Undang

RI No. 20 Tahun 2003 memberikan kabar baik bagi umat Islam dengan mengakui keberadaan madrasah dan pondok pesantren, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 4. UU ini memberikan paradigma baru dalam pendidikan keagamaan, mengatur kedudukan, fungsi, jalur, jenjang, dan bentuk kelembagaan pendidikan diniyah, pesantren, dan sejenisnya. (Abdul Rachman Shaleh, 2004). Undang-undang tersebut juga menetapkan pendidikan agama sebagai komponen wajib pada setiap jenjang pendidikan (Pasal 12 Ayat 1a).

Implementasi kebijakan pendidikan Islam diatur dalam PP RI No. 55 tahun 2007, yang mencakup jenis, tujuan, dan penyelenggaraan pendidikan Islam di jalur formal, nonformal, dan informal. Pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan Islam di Indonesia terdiri dari pendidikan diniyah dan pesantren. Pasal 14 terdiri dari 3 ayat yang menjelaskan bahwa: Pertama, pendidikan keagamaan Islam mencakup pendidikan diniyah dan pesantren. Kedua, pendidikan diniyah dilakukan melalui jalur formal, non-formal, dan informal. Ketiga, pesantren dapat menyelenggarakan berbagai program pendidikan di jalur tersebut.

Kebijakan kurikulum nasional Indonesia, termasuk Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, mengatur mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dan madrasah, dengan perbedaan dalam penyajian materi. Kemendikbudristek, PAI diajarkan sebagai satu mata pelajaran terpadu yang mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan sejarah Islam secara menyeluruh. Sementara itu, di madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama, PAI dibagi menjadi lima khusus. yaitu Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab. Perbedaan ini menunjukkan fungsi masing-masing kementerian dalam pendidikan, namun keduanya tetap berpegang pada Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum yang diterapkan tidak hanya menanamkan nilai-nilai keislaman, tetapi juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan berwawasan luas. (Kemenag RI, 2022). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 dan PP Nomor 4 Tahun 2022 menetapkan bahwa kurikulum nasional disusun oleh pemerintah pusat untuk diterapkan di semua tingkat pendidikan. (Kementerian Sekretaris Negara RI, 2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81A Tahun 2013 secara resmi mengatur penerapan Kurikulum 2013. (Kementerian Sekretaris Negara RI, 2021). Selanjutnya pada regulasi utama yang secara resmi menetapkan kurikulum merdeka adalah Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Regulasi ini memperluas fleksibilitas, memberian kontrol lebih kepada satuan pendidikan, dan menekankan pembelajaran esesnsial dan karakter. Pada kurikulum saat ini adanya perubahan administratif melalui permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 memperkuat kebijakan tanpa mengubah substansi kurikulum secara mendasar.

Dengan demikian kebijakan kurikulum nasional di Indonesia baik melalui kurikulum 2013 maupun merdeka, merupakan implementasi dari amanat undang-undang sistem pendidikan Nasional secara spesifik, regulasi turunan seperti Permendikbud 81A Tahun 2013 menetapkan Kurikulum 2013, sedangkan Permendikbudristek 12 Tahun 2024 beserta perubahannya dalam Permendikdasmen 13 Tahun 2025 mengatur penerapan Kurikulum Merdeka di seluruh jenjang pendidikan. Penerapan PAI di sekolah umum dan madrasah menunjukkan perbedaan yang disebabkan oleh kewenangan dua kementerian,

meskipun keduanya berlandaskan pada Standar Nasional Pendidikan dan tujuan pendidikan nasional untuk mencetak siswa yang beriman, berakhlak baik, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan zaman.

Berdasarkan pembahaan tentang kebijakan kurikulum maka perlu dilakukan implikasi atau hal-hal yang perlu dilakukan terkait isi matri pelajaran, metode mengajar, penilaian dan hasil belajar siswa. *Pertama* PAI berperan penting dalam struktur, konten, metode pembelajaran, dan evaluasi di sekolah umum serta madrasah, seperti yang terlihat dalam studi kasus di MTsN Kota Batu. (N. Mubin et al., 2025) Tim kurikulum sekolah secara aktif mengintegrasikan prinsip diferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek ke dalam modul PAI, dengan penekanan pada nilai-nilai Islami dan Profil Pelajar Pancasila yang bernuansa keislaman. *Kedua*, Materi dan metode pengajaran disesuaikan dengan karakter siswa. Guru memiliki kebebasan dalam menyusun silabus dan RPP berdasarkan capaian pembelajaran PAI yang mencakup Al Qur'an Hadis, Akidah, Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih personal dan bermakna sesuai dengan kebutuhan peserta didik.(Afiyah et al., 2024). Ketiga, Peningkatan kreativitas guru dan siswa, keaktifan peserta didik yang lebih tinggi, serta dorongan bagi guru untuk meningkatkan kapasitas profesional dalam mengelola modul ajar dan proyek P5 (Penguatan Profil Pelajar Pancasila) dalam pelajaran PAI. (Noor et al., 2023) Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti kebutuhan pelatihan guru yang intensif, penggunaan teknologi informasi yang belum maksimal, dan kesulitan dalam menentukan tema serta konten proyek yang sesuai dengan minat siswa.(Pionera et al., 2023). Ringkasan implikasi kebijakan pendidikan Islam terhadap kurikulum dapat dilihat pada matriks berikut.

Berdasarkan berbagai regulasi dan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk membentuk arah pengembangan kurikulum. Perubahan kebijakan dari masa ke masa menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyesuaikan pendidikan Islam dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dalam konteks ini, kurikulum madrasah tidak lagi berorientasi pada penguasaan materi keagamaan semata, tetapi juga diarahkan pada penguatan karakter, moderasi beragama, dan kemampuan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat multikultural.

Tabel.1.1 Implikasi Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Kurikulum

Aspek Kebijakan	**Sekolah Umum (Kemendikbudristek)**	**Madrasah (Kementerian Agama)**	**Implikasi Umum terhadap Kurikulum**	**Regulasi Terkait**
Struktur Kurikulum	PAI sebagai satu mata pelajaran terpadu (akidah, ibadah, akhlak, sejarah Islam)	PAI dipecah menjadi Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqh, SKI, Bahasa Arab	Penyesuaian jumlah jam dan pembagian materi sesuai kewenangan kementerian	UU No. 20 Tahun 2003 (Pasal 37), PP No. 57 Tahun 2021 jo. PP No. 4 Tahun 2022, KMA No. 183 Tahun 2019
Konten/Materi	Fokus pada nilai	Pendalaman	Materi	Permendikbud

Ajar	agama Islam, toleransi, karakter Pelajar Pancasila	ilmu keislaman sesuai rumpun pelajaran	disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan dan muatan lokal	81A Tahun 2013, Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024, KMA No. 183 Tahun 2019
Metode Pembelajaran	Tematik, kolaboratif, berbasis proyek (PjBL)	Kombinasi metode tradisional (hafalan) & modern (PjBL, diskusi)	Mendorong pembelajaran aktif, kontekstual, dan relevan	Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 (Pasal 5-7), KMA No. 183 Tahun 2019
Evaluasi	Penilaian autentik berbasis kompetensi	Penilaian berbasis kompetensi & ketuntasan hafalan/materi agama	Sistem penilaian sesuai SNP dan karakter mata pelajaran	PP No. 57 Tahun 2021 (Pasal 15), KMA No. 184 Tahun 2019
Nilai yang Ditanamkan	Moderasi beragama, kebangsaan, toleransi	Penguatan akidah, akhlak mulia, literasi agama	Integrasi nilai keislaman & kebangsaan untuk membentuk karakter utuh	KMA No. 183 Tahun 2019, Renstra Kemenag 2020–2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam memengaruhi kurikulum melalui perbedaan dalam struktur, materi, metode, evaluasi, dan nilai di sekolah umum dan madrasah. Sekolah umum mengajarkan PAI secara terintegrasi, sedangkan madrasah membaginya menjadi mata pelajaran khusus. Kebijakan kurikulum nasional memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran dengan menekankan pendekatan kontekstual, berbasis proyek, dan integrasi nilai keislaman dengan keterampilan abad ke-21 sesuai regulasi yang ada. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kesiapan guru, dukungan fasilitas, dan keselarasan kebijakan antar kementerian.

Konsep Multikultural dalam Kurikulum Pendidikan Islam

Konsep nilai-nilai multikultural dalam kurikulum Pendidikan Islam merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan prinsip penghargaan terhadap keberagaman ke dalam tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).(Ma'arif, 2015) elemen penting dalam pendidikan Islam yang mendukung prinsip multikulturalisme terdiri dari toleransi, keadilan, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan. (Rahmawati, Dwi, Subandi, 2023) Nilai-nilai ini tercermin dalam visi dan misi madrasah, materi pembelajaran yang menampilkan teladan Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah yang beragam, metode pembelajaran berbasis proyek sosial, dialog lintas perspektif, serta kegiatan pendidikan yang melibatkan kolaborasi antar budaya dan agama.

(Miftahussurur & Firdaus, 2024). Konsep implementasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum Pendidikan Islam mengintegrasikan penghargaan terhadap keberagaman (agama, etnis, budaya, bahasa, dan tradisi) dalam tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan mengintegrasikan multikultural yaitu (tasamuh), keadilan (adl), kerjasama (ta'awun), keterbukaan (infitah), dan kesetaraan (musawah).

Nilai multikultural dalam kurikulum PAI didukung oleh kebijakan nasional, termasuk KMA Nomor 183 Tahun 2019 mengenai Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa *"Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, moderat, toleran, dan menghargai keberagaman"* (Kementerian Agama RI, 2019) Renstra Kementerian Agama 2020–2024 menetapkan Penguatan Moderasi Beragama sebagai program prioritas nasional, dengan tujuan untuk "*menumbuhkan toleransi, menghargai perbedaan, dan mencegah kekerasan atas nama agama."* Kurikulum PAI di madrasah berperan sebagai alat untuk membentuk siswa yang inklusif, adaptif, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan semangat moderasi beragama.

Nilai-nilai multikultural dalam Kurikulum PAI diterapkan dalam berbagai aspek pembelajaran. Dokumen kurikulum mencerminkan visi dan misi madrasah/sekolah yang menekankan moderasi beragama, toleransi, dan keterbukaan terhadap perbedaan. (Mustafida, 2020) adapun materi ajar PAI yang mencirikan tentang nilai multikultural di madrasah tsanawiyah yaitu pada materi Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah yang beragam, serta menunjukkan contoh kehidupan harmonis secara inklusif. Sedangkan dalam metode pembelajaran, *pertama*, diskusi lintas pandangan. Dalam hal penelitian ini(Lubis & Ok, 2025) bahwa dengan adanya dialog dapat mengembangkan budaya akademik yang substantif, aktif dan mengeksplorasi keragaman pemikiran siswa. *Kedua*, pembelajaran berbasis proyek sosial (PjBL), model pembelajaran PJBL sudah sering diterapkan di sekolah yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar aktif, kontekstual dan berpusat pada siswa, hal ini sangat sesuai dalam integrasi dari nilai multikultural kedalam materi pembelajaran yang dihasilkan melalui model tersebut. Sebagai contoh dari (Ulfatun Nafi'ah & Djono, 2024) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan multikulturalisme dengan model PJBL dalam pendidikan sejarah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, sehingga memperkaya dan mencerminkan kompleksitas sejarah.

Ketiga, melalui kegiatan seperti lomba lintas budaya, dialog antaragama, dan kolaborasi ekstrakurikuler antar kelompok sosial yang dapat menciptakan lingkungan inklusif yang menghargai keberagaman. Hal ini sering dilakukan dalam peringatan 17 agustus, dialog antar agama, kegiatan lomba ekstrakulikuler antar sekolah. Dan pekan ilmiah atau kegiatan projek p5. Dalam hal ini didukung oleh penelitian (Hernawati, Andy Hadiyanto, 2020) melalui penguatan model pembelajaran berbasis proyek, masalah, dan pengalaman langsung berdampak pada internalisasi perilaku sosial siswa.

Temuan berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi nilai multikultural dalam kurikulum Pendidikan Islam tidak cukup dilakukan melalui penyisipan materi tentang toleransi dan keberagaman. Integrasi tersebut harus

tercermin secara menyeluruh dalam tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, budaya sekolah, serta interaksi sosial peserta didik. Dengan demikian, pendidikan multikultural dalam madrasah merupakan proses pembentukan karakter yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

Integrasi Nilai Multikultural di Madrasah Perspektif Penelitian Terbaru

Berdasarkan pembahasan sebelumnya sudah banyak penelitian relevan yang mengkaji tentang integrasi nilai multikultural di madrasah, baik dari segi dokumen pembelajaran, maupun perilaku sosial yakni toleransi, keterbukaan serta menghargai. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa madrasah memiliki potensi besar dalam membangun harmoni sosial melalui integrasi nilai multikultural. (Lubis & Ok, 2025). Selanjutnya menurut (Hanum OK, Azizah, Yumni Febriani Tanjung, 2025) bahwa internalisasi nilai multikultural dapat diterapkan secara konsisten dalam pembelajaran sehingga siswa dapat meningkatkan sikap toleransi dan inklusivitas.

Madrasah berperan membentuk karakter siswa yang toleran dan inklusif, kesadaran sosial, yang meliputi pemahaman perspektif orang lain, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan, dibangun melalui pendidikan yang terencana.(Nasution & Fauzan, 2025) Integrasi nilai-nilai multikultural di madrasah, melalui kurikulum, metode pembelajaran, budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler, efektif dalam menanamkan prinsip toleransi, keadilan, serta penghargaan terhadap keberagaman agama, etnis, bahasa, dan budaya. Dengan menghubungkan pembelajaran akademik dengan realitas sosial yang beragam, dan menginternalisasinya dalam perilaku. Ini sejalan dengan pandangan James A. Banks dalam(Nasution & Fauzan, 2025) yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses yang mengubah peserta didik untuk menganalisis budaya mereka sendiri dan memahami budaya orang lain. Oleh karena itu, semakin kuat nilai-nilai multikultural di madrasah, semakin tinggi kesadaran sosial siswa untuk hidup harmonis dalam perbedaan dan melihat keberagaman sebagai kekuatan, bukan ancaman.

Adapun tinjauan penelitian terkini oleh (Raudhah et al., 2024) tentang Konsep pendidikan multikultural di madrasah pada dasarnya dirancang untuk mengintegrasikan keberagaman agama, budaya, dan suku ke dalam proses pendidikan dengan mengedepankan prinsip pengakuan identitas, penghargaan terhadap perbedaan, serta pembentukan sikap toleransi dan solidaritas sosial. Dalam penelitiannya (Supriyanto & Amrin, 2022) Di MTsN 15 Boyolali, integrasi nilai dilakukan dengan manajemen kurikulum yang berlandaskan nilai-nilai multikultural. Proses ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, meskipun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya inovasi dari pengajar dan rendahnya literasi multikultural di kalangan guru.

Selanjutnya pada Internalisasi Nilai Multikultural di MTs Darul Huda Mayak Ponorogo Penelitian oleh (Riyadi, 2023) menyatakan bahwa nilai toleransi, penghormatan, dan keadilan dapat ditanamkan pada pembelajaran Akidah Akhlak. Mata pelajaran ini mengintegrasikan isu keberagaman dan nilai-nilai keislaman secara reflektif dalam metode pengajaran sehari-hari, yang membantu siswa memahami perspektif budaya dan sosial serta berinteraksi dengan toleran kepada teman sebaya dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, intergrasi tidak hanya melalui pembelajaran yang ada di madrasah tetapi bisa pada

aspek manajemen sekolah penelitian (Muhammad Yusuf & Maskuri, 2025) Menekankan pentingnya manajemen sekolah dalam mengintegrasikan prinsip multikultural dalam pengelolaan, pengajaran, dan interaksi siswa yang bertujuan untuk terciptanya lingkungan belajar yang harmonis dan inklusif. Dengan implikasi menjadi sebuah model yang dapat dijadikan acuan bagi MTs di berbagai wilayah.

Implementasi praktis integrasi kurikulum di madrasah pada Penelitian (Yusuf & Wahyuni, 2025) telah sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum. Sebanyak 85% RPP mata pelajaran mencakup aspek toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Metode pembelajaran PAI seperti diskusi digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas identitas. Topik kerukunan antarumat beragama dibahas secara kritis dan empatik, tidak hanya teoritis. Selain itu, praktik ibadah mencerminkan penghormatan terhadap perbedaan mazhab, menciptakan pendekatan dialogis yang mendalami kesadaran multikultural.

Integrasi nilai multikultural di madrasah memberikan sejumlah dampak positif yang signifikan. Berbagai penelitian di atas Pendidikan multikultural dapat meningkatkan kesadaran siswa akan keberagaman, membangun sikap toleransi, dan memperluas pemahaman antaragama serta budaya. (M. Mubin & Aryanto, 2022) Lebih jauh, proses ini berkontribusi pada pembentukan identitas nasional yang inklusif melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dan karakter berbudaya luhur. (Purba & Albina, 2025) Pendidikan yang berorientasi pada penghargaan terhadap perbedaan sejak dini juga terbukti efektif dalam mengurangi potensi radikalisme dan konflik sosial di kalangan santri. (Mahmudah & Noor, 2023) Meskipun demikian, penerapan nilai multikultural di madrasah masih menghadapi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Kurikulum yang cenderung berpusat pada satu perspektif agama terkadang kurang mampu menjangkau konteks sosial budaya yang lebih luas, sehingga peluang untuk membangun pemahaman yang holistik menjadi terbatas belum maksimalnya bahan ajar yang sesuai dan pelatihan guru menghambat penerapan nilai-nilai multikultural di madrasah. (Enggan Primus Siregar et al., 2025)

Jika dicermati secara keseluruhan, berbagai penelitian menunjukkan adanya kecenderungan yang sama, yaitu bahwa keberhasilan integrasi nilai multikultural di madrasah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kurikulum, kompetensi guru, budaya sekolah, dan dukungan kebijakan kelembagaan. Artinya, pendidikan multikultural tidak dapat dibebankan hanya kepada guru Pendidikan Agama Islam, tetapi harus menjadi bagian dari sistem pendidikan madrasah secara menyeluruh. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa penguatan nilai multikultural memerlukan pendekatan yang bersifat struktural dan kultural secara bersamaan.

Politik Pendidikan sebagai Instrumen Integrasi

Politik dalam sejarah Islam dikenal sebagai siyasat, yang berasal dari kata "sasa" dan berarti mengatur, memimpin, serta membuat kebijakan. Siyasat berfungsi untuk mengelola hal-hal politis demi mencapai tujuan tertentu. Abdul Wahhab Khallaf dikutip oleh ishomuddin dalam (Fazlurrahman H, M., 2017)seperti yang dikutip oleh Ishomuddin, mendefinisikan politik sebagai undang-undang yang bertujuan menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur situasi.

Diskursus politik pendidikan belum mencapai kesimpulan yang jelas. Banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah banyaknya lembaga pendidikan yang terikat oleh kebijakan pemerintah. Menurut Sirozi dalam (Fazlurrahman H, M., 2017) hubungan antara politik dan pendidikan di masyarakat, terutama di negara berkembang, justru menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menantang pandangan awal yang menganggap politik hanya dipenuhi oleh ambisi. Dikutip sama dalam (Fazlurrahman H, M., 2017) Roger Dale berpendapat bahwa politik pendidikan adalah hubungan antara tujuan dan pencapaian dalam politik, dengan fokus pada kekuatan yang menggerakkan mekanisme tersebut. Ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan terutama bergantung pada peran pemerintah. Meskipun terdapat kelebihan dan kekurangan dalam hubungan ini, yang lebih signifikan saat ini adalah perkembangan positif pendidikan Islam, yang kini telah terintegrasi dalam pendidikan nasional, menunjukkan adanya hubungan yang erat antara keduanya.

Politik pendidikan berperan dalam mendorong kebijakan kurikulum yang responsif terhadap konteks sosial-budaya Indonesia. Intervensi pemerintah dalam penyusunan kurikulum madrasah tidak terlepas dari dinamika politik nasional, termasuk upaya menjaga stabilitas sosial melalui pendidikan yang menghargai keragaman budaya dan agama (Shodikin, Jamiluddin, Ermanita, 2024) selain itu, Politik pendidikan berfungsi sebagai alat integrasi, mencerminkan strategi pemerintah dalam menggunakan pendidikan untuk menyatukan keberagaman sosial di Indonesia. Kebijakan yang didasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan nilai multikultural dalam kurikulum bertujuan untuk menanamkan toleransi, identitas kebangsaan, dan Pancasila. UU No. 20 Tahun 2003 mengatur pendidikan multikultural, pelaksanaannya masih kurang sistematis. Pelatihan guru belum mencukupi, dan penerapan nilai toleransi masih tidak konsisten. (Fazira et al., 2025) dan PMA No. 183 Tahun 2019 mengatur pendidikan sebagai upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan kurikulum yang menekankan nilai toleransi, kebhinekaan, dan Pancasila.

Madrasah di Indonesia mencerminkan keragaman sosial dari berbagai etnis, bahasa, dan latar belakang agama. Keberagaman ini menjadi potensi dan tantangan dalam upaya integrasi nasional. Survei (Balitbangdiklat Kemenag, 2023) menunjukkan bahwa madrasah berperan penting dalam mengajarkan nilai toleransi dan moderasi beragama, terutama melalui pembelajaran PAI. Praktik seperti diskusi antar tema keagamaan, kajian sejarah Islam yang menekankan persaudaraan, dan kolaborasi siswa dari latar belakang berbeda menunjukkan bahwa madrasah dapat berfungsi sebagai "miniatur masyarakat plural" yang harmonis. (Fazira et al., 2025)

Penelitian terkini menunjukkan bahwa pembelajaran PAI di madrasah, dengan pendekatan multikultural dan moderasi beragama, efektif dalam memperkuat integrasi nasional. Di madrasah, nilai-nilai toleransi, moderasi, empati, dan gotong royong dapat diinternalisasi melalui materi ajar yang relevan dengan konteks sosial, praktik keagamaan, dan interaksi lintas budaya. Sebagai contoh, integrasi nilai moderasi dan toleransi dalam pembelajaran PAI dapat membentuk karakter murid yang inklusif, menghargai perbedaan, dan menjunjung keadilan sosial, baik di kelas maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler.(Widat, Faizatul, 2025). Selanjutnya pada strategi pembelajaran PAI yang efektif mencakup pendekatan multikultural, moderasi beragama, dan pendidikan

karakter. Guru PAI dapat mengintegrasikan multikultural ke dalam kurikulum nasional melalui diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek serta media digital. Materi seperti akhlak, fiqh muamalah, dan sejarah kebudayaan Islam harus dihubungkan dengan kehidupan siswa untuk menumbuhkan empati, gotong royong, dan saling menghormati. Program Kementerian Agama, seperti Penguatan Moderasi Beragama di madrasah, mendukung melalui pelatihan guru dan pengembangan modul moderasi.(Murtadlo, 2025). Melalui politik pendidikan agama islam di madrasah berimplikasi sebagai terciptanya generasi muda dengan identitas nasional yang kokoh, kesadaran sosial yang tinggi, kemampuan berkolaborasi, mencegah disintegrasi, intoleransi dan memperkuat kohesi sosial bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa politik pendidikan memiliki posisi yang sangat menentukan dalam proses integrasi nilai multikultural di madrasah. Kebijakan kurikulum, program moderasi beragama, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Pelajar Rahmatan lil 'Alamin merupakan bentuk intervensi negara dalam membangun kohesi sosial melalui pendidikan. Dengan kata lain, keberhasilan integrasi nilai multikultural tidak hanya bergantung pada praktik pembelajaran di kelas, tetapi juga pada arah kebijakan pendidikan yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai aktor utama dalam sistem pendidikan nasional.

Tantangan dan Peluang

Perspektif politik pendidikan integrasi ini bukan hanya persoalan pedagogis tetapi juga terkait erat dengan arah kebijakan negara, dinamika politik identitas, dan strategi membangun kohesi sosial. Kebijakan seperti Kurikulum Merdeka, penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta gerakan moderasi beragama yang digagas Kementerian Agama, menjadi payung formal yang memungkinkan pengintegrasian nilai multikultural di madrasah. Namun, proses ini tidak lepas dari berbagai tantangan internal dan eksternal yang dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya.

Adapun yang menjadi tantangan dalam hal ini pertama, keterbatasan kompetensi guru dalam pendidikan moderasi. Banyak guru PAI yang belum sepenuhnya memahami prinsip multikulturalisme dan moderasi beragama, sehingga penerapannya dalam pembelajaran sering kali tidak menyeluruh atau hanya bersifat formal. Temuan Nuhaliza et al. (2024) di MTs Sunan Pandanaran Yogyakarta menunjukkan bahwa banyak guru kesulitan mengintegrasikan nilai moderasi beragama secara kontekstual. Penelitian (Faoziah, 2016) juga menyoroti bahwa kurangnya pelatihan khusus untuk guru dalam strategi pembelajaran multikultural, seperti diskusi lintas budaya dan pembelajaran kolaboratif, memperburuk masalah ini. Akibatnya, pembelajaran yang seharusnya membentuk karakter inklusif cenderung hanya menekankan aspek kognitif, tanpa cukup memberi ruang untuk pengembangan sikap dan keterampilan sosial yang menghargai keberagaman. Kedua, Keterbatasan bahan ajar dan fasilitas yang mendukung nilai multikultural menjadi hambatan utama dalam integrasi toleransi dan inklusivitas di Madrasah Tsanawiyah. Studi di MTs Negeri Gunungsitoli (Lubis & Ok, 2025)menunjukkan banyak madrasah kekurangan buku dan media interaktif multikultural, menyulitkan guru dalam merancang pembelajaran kontekstual, terutama di daerah terpencil. Akses terbatas terhadap sumber daya

digital dan media audiovisual menghambat penggunaan pendekatan diskusi lintas budaya dalam pembelajaran. Akibatnya, metode pengajaran yang dominan adalah ceramah dan hafalan, yang lebih menekankan aspek kognitif dan kurang mendukung pengembangan empati serta sikap inklusif . Fasilitas yang mendukung, pengadaan bahan ajar yang relevan dan akses digital menjadi prasyarat dalam memperkuat pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam yang berjiwa multikultural di madrasah.

Ketiga, Keberagaman latar belakang peserta didik di madrasah adalah aset sosial penting untuk menginternalisasikan nilai-nilai multikultural. Penelitian oleh (Zaini & Zulkarnain, 2025) menunjukkan bahwa desain lingkungan asrama dan kelas secara sistematis mendukung interaksi antar berbagai latar belakang, seperti pengaturan tempat duduk dan pembagian asrama yang acak, sehingga santri baru dapat beradaptasi hidup bersama. Praktik ini memperkuat nilai toleransi, saling menghormati, dan kesetaraan. Pendidikan multikultural di pesantren diterapkan melalui beragam aktivitas formal dan nonformal, termasuk pembelajaran di kelas, pengembangan diri, serta kegiatan di asrama dan luar pesantren, yang bertujuan menumbuhkan nilai demokrasi, keadilan sosial, kebersamaan, dan saling membantu. Dalam konteks politik pendidikan, keberagaman ini memperkuat madrasah sebagai agen pembentuk karakter bangsa dan pengikat sosial di masyarakat majemuk. Dengan kurikulum dan budaya institusi yang inklusif, madrasah dapat menjadi wadah efektif untuk pendidikan Islam yang moderat dan multikultural.

Keempat, Budaya monokultural di madrasah menjadi penghalang bagi pendidikan multikultural yang inklusif. Madrasah yang hanya mengedepankan satu budaya atau interpretasi keagamaan cenderung menciptakan atmosfer eksklusif, sehingga siswa dari latar belakang berbeda merasa terpinggirkan. Moh Isom Yusqi, Direktur KSKK Madrasah(https://kemenag.go.id/kolom/pendidikan-madrasah-berbasis-pluralitas) menekankan pentingnya pendidikan madrasah yang berbasis pluralitas untuk menjamin hak asasi dan inklusi sosial tanpa diskriminasi. Tanpa pengelolaan yang adil, seperti kebijakan inklusivitas dan dialog antar kelompok, kelompok minoritas dapat mengalami ketidakadilan. Dari sudut pandang politik pendidikan, resistensi budaya ini mengurangi potensi madrasah sebagai agen persatuan dan bertentangan dengan prinsip multikulturalisme. Oleh karena itu, transformasi budaya institusional madrasah sangat penting untuk menciptakan pendidikan Islam yang menghargai keberagaman dan kesetaraan. Kelima, Politisasi Identitas dan Ketegangan Ideologis. Dalam politik pendidikan Indonesia, penguatan identitas agama dan kesukuan kerap memicu resistensi terhadap kurikulum bernuansa multikultural yang dianggap "liberal" oleh sebagian kelompok konservatif. Kondisi ini diperburuk oleh politisasi identitas, yakni pemanfaatan isu agama dan etnis sebagai alat politik yang dapat menghambat penerimaan nilai-nilai inklusif. (Budiono, 2021) menegaskan bahwa pendidikan multikultural diperlukan untuk menanggulangi potensi intoleransi yang lahir dari politik identitas. Sementara itu, (Khoir, 2024)menunjukkan bahwa paradigma PAI multikultural mampu menjadi strategi membangun harmoni sosial di tengah polarisasi ideologis.

Kemudian peluang *pertama*, dapat mengintegrasi nilai multikultural dan moderasi beragama dalam kurikulum di madrasah. Hal ini menjadi peluang bagi sekolah atau madrasah untuk meningkatkan dan menguatkan nilai multikultural di

madrasah. *Kedua*, implementasi kurikulum merdeka dan profil pelajar pancasila. Kebijakan nasional ini memberi ruang bagi integrasi nilai toleransi, solidaritas, dan kebinekaan di dalam pembelajaran PAI, mendukung penguatan karakter bangsa. *Ketiga*, Madrasah beragam sebagai contoh lingkungan inklusif serta potensi kolaborasi eksternal. *Keempat*, adanya pelatihan moderasi dan metode inovatif seperti PAIKEM memberi peluang transformasi pengajaran dan model pembelajaran berbasis projek sebagai dasar dari implementasi kurikulum merdeka yang menekankan pada aspek karakter P5 Rahmatan Lil ‘alamin. Kelima, Penggunaan teknologi dan metode pembelajaran interaktif yang berorientasi multikultural, seperti model pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan internalisasi nilai toleransi, empati, dan kebersamaan dalam Pendidikan Agama Islam. (Faoziah, 2016)menekankan bahwa media digital, diskusi lintas budaya, dan studi kasus kontekstual membantu siswa memahami keberagaman secara praktis. Penelitian (Hernawati, Andy Hadiyanto, 2020) menunjukkan bahwa metode kolaboratif dan berbasis proyek dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya harmoni sosial.

Analisis terhadap berbagai tantangan dan peluang tersebut menunjukkan bahwa integrasi nilai multikultural di madrasah berada pada posisi yang strategis sekaligus kompleks. Di satu sisi, kebijakan nasional memberikan ruang yang semakin luas bagi penguatan nilai toleransi, moderasi beragama, dan kebinekaan. Namun di sisi lain, keberhasilan implementasinya masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, budaya institusi, serta dinamika sosial-politik yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan, kurikulum, dan praktik pendidikan agar nilai-nilai multikultural dapat diinternalisasikan secara optimal.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas menyimpulkan bahwa kebijakan nasional, seperti Kurikulum Merdeka, Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan Pelajar Rahmatan lil ‘Alamin (P5RA), serta regulasi dari Kementerian Agama, telah memberikan dasar formal bagi penerapan prinsip-prinsip multikultural dalam pendidikan agama. Penerapan nilai-nilai ini tidak hanya terlihat dalam dokumen kurikulum, tetapi juga dalam materi ajar, metode pembelajaran, budaya sekolah, manajemen madrasah, serta kegiatan ekstrakurikuler.

Politik pendidikan memiliki peranan penting dalam mengarahkan kebijakan kurikulum agar responsif terhadap keberagaman sosial-budaya, sehingga madrasah dapat berfungsi sebagai agen integrasi nasional. Namun, tantangan seperti kurangnya kompetensi guru, keterbatasan bahan ajar, budaya monokultural, dan politisasi identitas masih menjadi kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kolaboratif antara pemerintah, pengelola madrasah, pendidik, dan masyarakat untuk memperkuat literasi multikultural, meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, serta membangun budaya institusi yang inklusif dan menghargai perbedaan.

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai multikultural di madrasah tidak hanya merupakan persoalan pedagogis, tetapi juga berkaitan erat dengan arah politik pendidikan yang membentuk kebijakan kurikulum nasional. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami hubungan antara politik pendidikan, pengembangan kurikulum, dan penguatan nilai-nilai

multikultural di Madrasah Tsanawiyah sebagai upaya membangun pendidikan Islam yang harmonis, moderat, dan responsif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyah, L., Regita Ayu Pratiwi, A., & Maulidatuzzahro. 2024. Pendidikan Agama Islam Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dan Madrasah.

Jurnal Pendidikan Islam, *13*(2), 152–159. https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/talimuna

Bektiarso, S., Walukow, A. F., Narulita, E., Jayapura, U. C., & Jember, U. 2024. Building Inclusive Learning Communities in Multicultural Classrooms : The Role of the CTL Model in Learning Interpersonal Skills. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, *5*(4), 568–583.

Budiono. 2021. Urgensi Pendidikan Multikultural Dalam Pengembangan Nasionalisme Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, *6*(1), 79–89.

Edy, E., & Huriah, Y. 2022. Pendidikan Multikultural Dalam Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah: *Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam*, *6*(1), 14–27. https://doi.org/10.56146/edusifa.v6i1.2

Enggan Primus Siregar, Raihan Daniyah Lubis, Holida Yanti, & Sabbah Niarni Panjaitan. 2025. Merayakan Keberagaman: Strategi Pendidikan Multikultural Di Sekolah. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, *4*(3), 246–259. https://doi.org/10.47006/pendalas.v4i3.513

Fahmi, M., Nuruzzaman, M. A., Hilmy, M., Alfiyah, H. Y., Nadlir, Abdul Aziz, N. A., & Huriyah, L. 2025. Multicultural Islamic Education as Strategy for Strengthening Social Cohesion in Islamic School. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, *8*(1), 154–175. https://doi.org/10.31538/nzh.v8i1.67

Faoziah, N. 2016. Peran dan Tantangan Pengembangan Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural di Pesantren Sunan Pandanaran. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, *1*(2), 197–226.

Fazira, W., Wilda Afriani Batubara, & Anwar Saputra Siregar. 2025. Integrasi Pendidikan Multikultural Dalam Sistem Pendidikan Nasional: Strategi Membangun Masyarakat Inklusif Dan Toleran. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, *4*(3), 186–203. https://doi.org/10.47006/pendalas.v4i3.509

Fazlurrahman H, M., dkk. 2017. *Politik Pendidikan Islam* (Abd. Haris (ed.); 1st ed.). Imtiyaz.

Hanum OK, Azizah, Yumni Febriani Tanjung, S. R. 2025. Internalizazion of Multicultucal Education At Muhammadiyah Private Junior High School In Gunungsitoli City. *IJIERM: International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism*, *7*(2), 444–462.

Hayyu Liyandani, O., & Nur Kolis. 2021. Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, *2*(2), 145–154. https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.44

Hernawati, Andy Hadiyanto, A. 2020. Integrasi Nilai-nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, *4*(2), 173–185. https://doi.org/10.35316/jpii.v4i2.191

Khoir, Q. 2024. Paradigma Pendidikan Agama Islam Multikultural (Strategi Membangun Harmoni Di Tengah Polarisasi Sosial). *Mumtaz: Jurnal Pendidikan AGgama Islam*, *4*(2).

Lubis, L., & Ok, A. H. 2025. Wajah Pendidikan Multikultural Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gunung Sitoli. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, *9*(1), 178–188.

Ma'arif, S. 2015. *Integrasi Nilai-Nilai Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Dharma Lestari Salatiga*.

Mahmudah, M., & Noor, T. 2023. Pendidikan Multikultural Sebagai Preventif Ideologi Radikalisme di Kalangan Santri Madrasah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *17*(2), 401. https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.2001

Miftahussurur, W., & Firdaus, R. 2024. Analisis Konseptual tentang Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Islam. *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, *6*(2), 130–144. https://doi.org/10.55606/ay.v6i2.1288

Mubin, M., & Aryanto, S. J. 2022. Pelaksanaan Pendidikan Islam Multikultural di Madrasah Ibtidaiyah. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *2*(01), 72–82. https://doi.org/10.47709/educendikia.v2i01.1433

Mubin, N., Basri, B., Nur, M. A., & Ma'ruf, R. A. 2025. Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Agama Islam untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(6), 6849–6858. https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8568

Muhajir, M., Kultsum, U., Mustonah, S., Kulkarni, H., Karim, A., Islam, U., Sultan, N., Hasanuddin, M., Islam, U., Kiai, N., Muhammad, A., Ponorogo, B., & Cirebon, U. M. 2025. Integrating Multicultural Value To Foster Tolerance And Inclusivity In Islamic Religious Education. *Jurnal Pendidikan Islam*, *11*(20), 17–32. https://doi.org/10.15575/jpi.v11i1.44607

Muhammad Yusuf, & Maskuri. 2025. The Integration of Multiculturalism Values in School Management at Mts Favorit Darut Taqwa. *Bulletin of Pedagogical Research*, *5*(1), 55–73. https://doi.org/10.51278/bpr.v5i1.1750

Murtadlo, M. 2025. Integrasi nilai-nilai multikultural ke dalam pai untuk meningkatkan toleransi siswa di smanurussalam ambulu. *Jurnal Pendidikan Islam Majemuk*, *2*, 50–60.

Mustafida, F. 2020. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Multikultural di MIN I Kota Malang. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *6*(1), 15–27. https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8085

Nasution, S. I., & Fauzan, A. 2025. Building Students' Social Awareness through Multicultural Education. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, *10*(1).

Noor, I. H., Izzati, A., & Azani, M. Z. 2023. Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Journal of Islamic Education Thoughts and Practices*, *07*(01), 30–47. http://repository.unimus.ac.id/7276/

Pionera, M., Syarif, A., & Agustina, S. R. 2023. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Mata Pelajaran Pai Kelas Vii Smpn Satu Atap-2 Tewang Sangalang Garing. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, *10*(2), 20–25. https://doi.org/10.33084/jhm.v10i2.6538

Purba, F. A., & Albina, M. 2025. Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural di Sekolah/Madrasah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry …*, *2*(2). https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/article/view/3042

Putra Daulay, H. 2004. *Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Kencana.

Rahmawati, Dwi, Subandi, S. R. J. 2023. Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Akidah Akhlak. *Indonesian Journal of Education Management and Leadership*, *01*(02), 197–214.

Raudhah, S., Khaira, M. U., & Hanum, A. H. 2024. Konsep Pendidikan Multikultural di Madrasah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*, 6121–6129. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13333

Riyadi, I. 2023. Implementation of Multicultural-Based Character Values to Remind Tolerance for Diversity in Social Studies Learning (Exploratory Study on MTs Students). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *12*(3), 869–880. https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.5243

Rizki, M. F. F., Zamzani, P. N., & Fahreza, M. 2024. Analisis Kebijakan Kurikulum Madrasah dan Madrasah Diniyah di Indonesia. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(1), 809–816. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3150

Shodikin, Jamiluddin, Ermanita, S. 2024. Keterkaitan Antara Politik Pendidikan, Kebijakan Pendidikan dan Kekuasaan serta Implikasinya Para Praktek Pendidikan di Lembaga Pendidikan (Islam). *JPPG: Jurnall Pengembangan Profesi Guru*, *Maret*(2), 1–23.

Supriyanto, S., & Amrin, A. 2022. Curriculum Management and Development of Multicultural Values Based Learning on State Madrasah Tsanawiyah 15 Boyolali. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, *14*(4), 5991–6002. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i4.2201

Syafruddin, Rif'an, Anshary, H., Hidayah, A., & Kalimantan, S. 2024. Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Transnational Salafi Education and Its Consequences for Multicultural Harmony in Indonesia. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, *19*(2), 231–248. https://doi.org/10.21043/edukasia.v19i2.28944

Tri Cahyanti, E. 2021. Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, *2*(2), 181–197. https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.47

Ulfatun Nafi'ah, & Djono. 2024. Designing a Project-Based Learning (PjBL) Model on Multiculturalism in History. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, *8*(1), 901–918. https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3804

Umam, M. A., Rezza, M., Rahman, N., & Qodriyah, L. 2025. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Multikultural di Madrasah Aliyah Raadhiyatan Mardhiyyah Putra Balikpapan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *9*(1), 6922–6928.

Widat, Faizatul, W. R. U. 2025. Pendekatan Multikultural Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk Memperkuat Toleransi Antar Agama. *Pendasa: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(10), 2548–6950.

Yusuf, M., & Wahyuni, S. 2025. Implementation of the Multicultural Islamic Religious Education Curriculum in Madrasa. *Journal of Contemporary Islamic Education*, *5*(1), 86–95. https://doi.org/10.25217/jcie.v5i1.4890

Zaini, M., & Zulkarnain, A. I. 2025. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 8 Palangka Raya. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *6*(1), 26–38